

PERANAN WKSBM DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Studi Kasus di Sulawesi Utara

Suradi

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mengidentifikasi profil dan peranan WKSMB di Provinsi Sulawesi Utara dalam pembangunan masyarakat. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, dikumpulkan data dari tokoh masyarakat, pengelola perkumpulan sosial lokal dan aparat pemerintah lokal secara purposive. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Setelah data dikumpulkan dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk uraian yang menjelaskan profil dan peranan WKSMB dalam pembangunan masyarakat berdasarkan konsep dan tinjauan teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa di lokasi penelitian ditemukan bentuk keperangkatan pelayanan sosial berbasis lingkungan, berbasis agama dan bersifat independen. Dimana jenis-jenis keperangkatan pelayanan sosial tersebut secara konseptual merupakan unsur-unsur dari WKSMB. Keperangkatan pelayanan sosial tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sosial kemasyarakatan, yang manfaatnya telah dirasakan secara ekonomis maupun sosial. Antar keperangkatan pelayanan sosial telah mengembangkan sistem kerjasama dan sinergis dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya sosial, dalam rangka optimasi pembangunan masyarakat.

Kata kunci: WKSMB, keperangkatan pelayanan sosial dan jaringan sosial, pembangunan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi tugas bersama antara negara, pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 1, yaitu: "setiap warga negara berhak atas taraf kehidupan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin untuk ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial". Pada pasal 8 ditegaskan lebih lanjut, bahwa: "masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijakan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".

Usaha kesejahteraan sosial dimaksud meliputi kegiatan pencegahan terjadinya masalah sosial, penanganan dan rehabilitasi sosial, serta pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara optimal, apabila

masyarakat memiliki kesadaran dan kohesivitas sosial yang tinggi. Hanya dengan kesadaran dan kohesivitas sosial ini akan membimbing dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan aksi sosial.

Dewasa ini masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan pada sendi-sendi kehidupan sosial, mulai dari lingkungan keluarga hingga di lingkungan masyarakat. Tindak kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan konflik sosial antar kelompok masyarakat, serta konflik antara masyarakat dengan pemerintah, merupakan indikasi memudarnya rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial. Kondisi ini diperparah lagi dengan bencana alam yang silih berganti yang terjadi berbagai daerah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang tidak populer, seperti: kenaikan harga BBM, taraf dasar listrik, dan harga kebutuhan pokok.

Akumulasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan mempengaruhi kapasitas pribadi warga masyarakat tersebut. Kepakaan

sosial menjadi kurang terasah (mati rasa) karena disibukkan dengan beratnya beban mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Persoalan tidak berhenti sampai di situ, akumulasi permasalahan yang dihadapi masyarakat menyebabkan gangguan kejiwaan, stress dan bahkan depresi. Akibat yang dapat dilihat, adalah masyarakat menjadi sangat mudah diprovokasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat anarkis. Masyarakat menjadi lemah dalam membuat pertimbangan rasional, dan sebaliknya berpotensi untuk menempuh langkah-langkah yang irasional (lihat Algrie, 1999).

Pada masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan, ada suatu mekanisme pemecahan masalah yang sudah ada secara turun temurun. Mekanisme tersebut dapat ditemukan di dalam kelompok-kelompok sosial yang tumbuh di masyarakat lokal. Sebagian dari kelompok sosial tersebut tumbuh dari masyarakat yang dilandasi oleh nilai dan adat istiadat. Sedangkan sebagian yang lain ditumbuhkan dari luar sebagai media menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (lihat Markus, 2002; lihat Nuryana, 2002).

Dalam kehidupan sehari-hari, keperangkatan pelayanan sosial dikenal dalam bentuk perkumpulan sosial lokal atau kelompok tolong menolong, tetulung layat, kelompok jema'at, ta'lim, kelompok tani dan sejenisnya. Di dalamnya sarat dengan nilai, norma dan kearifan lokal yang membimbing perilaku sosial warga masyarakat untuk menjalani kehidupan bersama. Secara sosiologis, keperangkatan pelayanan sosial tersebut tercakup di dalam konsep kapital sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Grootaert (Lawang, 2005), bahwa kapital sosial menunjuk pada institusi, hubungan, sikap dan nilai yang membimbing interaksi di antara manusia dan memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial.

Perhatian terhadap keperangkatan pelayanan sosial sebagai kapital sosial telah menjadi gerakan global. Nicole (2001) mengutip dokumen Agenda 21 hasil Konferensi PBB di Rio de Janeiro tahun 1992. Di dalam dokumen tersebut secara resmi mengakui pentingnya tingkat lokal dan organisasi-organisasinya, dengan konsep "Think Globaly,

Act Locally". Dokumen ini menjadi dasar moral paradigma baru pembangunan yang membuka peluang bagi organisasi swadaya (*self-help organization*) untuk memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam pembangunan masyarakat. Paradigma baru dalam pembangunan ini mengakui, bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengorganisasikan diri (dalam organisasi swadaya) guna memecahkan masalah mereka. Disamping itu, organisasi lokal atau organisasi swadaya mampu menjembatani keberlanjutan dan pembangunan partisipatif.

Dalam konteks Indonesia, pemberian ruang yang bebas terhadap perkumpulan sosial, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Dimana setiap Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai potensi dan kapital yang dikuasai, baik ekonomi maupun sosial. Apabila keperangkatan pelayanan sosial ini dapat diberdayakan secara optimal, maka akan menjadi modal yang besar dalam pembangunan masyarakat.

Realita keperangkatan pelayanan sosial dan jaringan yang terbentuk dari keperangkatan pelayanan sosial, dikenal dalam konsep dan pengertian Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat atau WKSBM (lihat Dit PKSM, 2005). Sejak tahun 2002, WKSBM telah menjadi program pada Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, dan sejak tahun 2004 telah ditumbuhkan sebanyak 564 di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai pemikiran tentang WKSBM dan unsur-unsurnya yang berupa keperangkatan pelayanan sosial, maka penelitian tentang peranan WKSBM dalam pembangunan masyarakat ini dilaksanakan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi tentang profil dan aktivitas-aktivitas WKSBM yang dapat menggambarkan peranannya dalam pembangunan masyarakat ditingkat lokal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan profil dan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan

WKSMB yang mencerminkan peranannya dalam pembangunan masyarakat di Sulawesi Utara. Penentuan lokasi penelitian secara purposive dengan pertimbangan, bahwa di lokasi tersebut tersedia data WKSMB yang ditumbuhkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bitung, masing-masing kabupaten sebanyak 9 unit WKSMB di 9 desa/kelurahan (Dit. PKSM, 2005). Selanjutnya di Kabupaten Minahasa secara purposive terpilih Desa Wewelan mewakili tipe perdesaan, dan di Kabupaten Bitung terpilih Kelurahan Kadoodan yang mewakili tipe perkotaan, masing-masing satu unit WKSMB.

Sumber data penelitian, yaitu: aparat desa, pengelola keperangkatan pelayanan sosial (KPS) pengelola WKSMB dan tokoh masyarakat setempat. Sumber data tersebut ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan kedudukan formal, dan pentahuannya tentang keperangkatan pelayanan sosial (KPS) dan WKSMB. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditentukan 2 (dua) orang aparat desa (kepala/sekretaris desa dan urusan pemerintahan), 5 (lima) orang pengelola WKSMB dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat terdiri dari (tokoh agama, adat dan sosial masing-masing 1 (satu) orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (a) studi dokumentasi terhadap dokumen tertulis, hasil-hasil penelitian, perundang-undangan dan literatur lainnya yang mendukung tujuan penelitian, (b) wawancara mendalam yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang obyektif dan mendalam tentang peranan WKSMB dalam pembangunan masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan diolah berdasarkan kategori data yang telah ditentukan. Kemudian dianalisis dengan teknik analisa kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan tujuan penelitian dan konsep serta kajian teoritis yang digunakan. Arah dari analisis kualitatif, yaitu diperolehnya informasi yang berkaitan dengan profil dan jaringan kerja antar keperangkatan pelayanan sosial yang ada di masyarakat; aktivitas ekonomi dan sosial yang dilaksanakan oleh keperangkatan pelayanan sosial; dan manfaat bagi masyarakat dari aktivitas keperangkatan pelayanan sosial dalam pembangunan

masyarakat. Berdasarkan data dan informasi tersebut akhirnya dapat diketahui, bagaimana peranan WKSMB dalam pembangunan masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Desa Wewelan

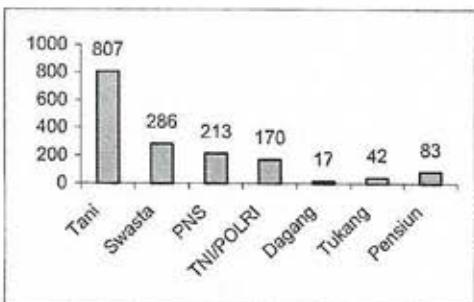
Desa Wewelan adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Tondano Barat, Kota Minahasa. Luas Desa Wewelan seluas 398 Ha, dan secara topografis 500-700 M di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Wewelan sebelah utara berbatasan dengan Desa Kembuan dan Desa Suluan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Watulambot, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Watulambot dan Kelurahan Sumalangka dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Luau dan Kelurahan Ranowangko.

Jarak dari Desa Wewelan ke Kecamatan Tondano Barat sejauh 2 (dua) Km, ke Kota Minahasa Induk sejauh 1 (satu) Km dan ke ibu kota propinsi Sulawesi Utara sejauh 36 Km. Untuk mencapai Desa Wewelan sangat mudah, karena dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, dengan kondisi jalan beraspal dalam kondisi baik.

Desa Wewelan dihuni oleh 2.696 jiwa atau 726 Kepala Keluarga dengan rincian laki-laki sebanyak 1.379 jiwa dan perempuan sebanyak 1.317 jiwa. Sebagian besar penduduk beragama kristen, yaitu berjumlah 2.483 orang atau 92.10 persen. Untuk keperluan ibadah bagi umat kristen maupun katholik telah dibangun 4 unit gereja, sedangkan bagi umat islam belum dibangun mesjid maupun surau. Khusus untuk umat kristiani, mereka membentuk kelompok (kolom) sebanyak 18 kolom dengan anggota masing-masing kolom sekitar 30 orang. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk pada jenjang

pendidikan rendah, yaitu sebanyak 1.376 menamatkan pendidikan SD-SLP.

Kemudian dilihat dari jenis pekerjaan, menunjukkan bahwa penduduk yang termasuk memiliki pekerjaan rendah (lebih banyak mencurahkan tenaga fisik, yakni pada jenis pekerjaan petani dan tukang) cukup besar, yaitu sebesar 849 atau 31,49 persen, sebagaimana tampak pada diagram berikut :



Khusus pada pekerjaan sebagai petani, mereka mengolah sawah seluas 168 Ha dan ladang seluas 153 Ha. Dengan demikian rata-rata setiap petani mengolah lahan pertanian seluas 0.4 Ha.

Selanjutnya dilihat dari tipe rumah yang dihuni, penduduk yang menempati rumah tidak permanen jumlahnya paling menonjol, yaitu 408 KK atau 56,19 persen dari jumlah KK. Kondisi ini menggambarkan salah satu indikator, bahwa taraf hidup penduduk Desa Wewelan relative masih rendah. Aksesibilitas penduduk akan informasi relatif cukup baik, dilihat dari peralatan komunikasi untuk umum maupun yang dimiliki penduduk. Dari 726 KK, sebanyak 298 KK (41 %) sudah memiliki TV, 30 KK (4.13 %) sudah memasang telepon, dan 115 KK (15.84 %) memiliki radio. Disamping itu terdapat telepon umum satu unit.

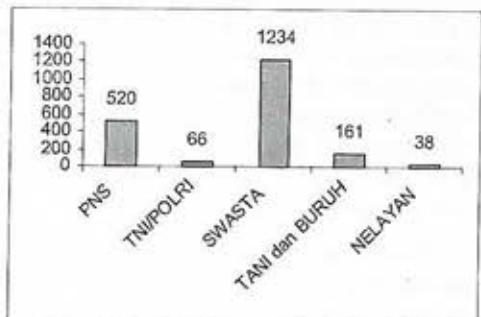
2. Kelurahan Kadoodan

Kelurahan Kadoodan merupakan salah satu dari kelurahan di Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung. Kota Bitung merupakan kota pelabuhan besar, yang merupakan gerbang masuknya

pendatang dari kawasan timur di provinsi Sulawesi Utara. Karena itu, permasalahan sosial yang ada tentu akan lebih kompleks.

Kelurahan Kadoodan memiliki wilayah seluas 138 Ha. Jarak dari kota kecamatan sejauh 1 km, dari kota 1 km dan dari ibu kota propinsi sejauh 45 km atau sekitar 60 menit. Kelurahan Kadoodan memiliki penduduk sebanyak 3.670 jiwa atau 814 KK, dengan rincian laki-laki berjumlah 1.895 jiwa dan perempuan berjumlah 1.775 jiwa.

Dilihat dari jenis pekerjaan, penduduk yang menekuni pekerjaan pada kategori rendah masih cukup besar, yaitu sebesar 199 orang (KK) atau 24.45 persen dari jumlah KK (pada jenis pekerjaan tani, buruh dan nelayan kecil), sebagaimana tampak pada diagram berikut :



Berdasarkan jenis-jenis pekerjaan penduduk sebagaimana tampak pada diagram tersebut, bahwa jumlah penduduk yang taraf hidupnya tergolong relative rendah masih cukup besar.

Kemudian dilihat dari jenis-jenis agama yang dianut oleh penduduk, agama Protestan dianut oleh sebagian besar penduduk di Desa Kadoodan, yaitu 2.044 jiwa atau 55,69 persen dari jumlah penduduk. Meskipun demikian, sejauh ini penduduk menjalani hidup secara damai dengan pemeluk agama yang lain, yaitu Islam, Katholik, Hindu dan Budha. Penduduk mampu mengembangkan kehidupan toleransi antar umat beragama dan menjalani kehidupan secara damai.

Berbagai jenis kesenian yang dikembangkan penduduk, yaitu tulude,

maengket, taganggong dan rebana. Jenis-jenis kesenian tersebut sering ditampilkan oleh masyarakat pada kesempatan tertentu. Namun demikian, kesenian tersebut dirasakan kurang berkembang di kalangan generasi muda kini.

B. PROFIL WKSBM

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pedoman Pemberdayaan WKSBM yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat (2005), bahwa WKSBM memiliki unsur-unsur berupa keperangkatan pelayanan sosial (KPS) yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan keperangkatan pelayanan sosial. WKSBM terbentuk dari jaringan sosial KPS-KPS tersebut yang sekaligus menjadi pilar-pilar dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan itu, dalam rangka memahami profil WKSBM, berikut akan dipaparkan dimensi-dimensi WKSBM, yaitu dimensi kelembagaan, sistem nilai dan jaringan sosial.

1. Dimensi Kelembagaan

WKSBM merupakan sistem kerjasama antar Keperangkatan Pelayanan Sosial (KPS) dan jaringan pendukungnya yang ada di Kelurahan Kadoodan (tipe desa perkotaan) dan Desa Wewelan (tipe desa perdesaan). Sedangkan KPS adalah terminologi yang digunakan untuk menunjuk pada keperangkatan pelayanan sosial yang menjadi unsur dari WKSBM. Berikut akan disajikan informasi profil KPS sebagai unsur WKSBM yang ada di kedua desa/kelurahan lokasi penelitian. Melalui penyajian informasi tentang KPS-KPS sebagai unsur WKSBM, maka akan diketahui kondisi kelembagaan WKSBM tersebut.

- Rukun Lingkungan, yaitu KPS yang berada di basis lingkungan. Rukun Lingkungan yang merupakan asosiasi warga ini ada di setiap lingkungan (RT/RW). Rukun Lingkungan ini memiliki anggota seluruh warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Kegiatan utama dari Rukun

Lingkungan adalah mengelola dana kematian, dana sehat, simpan pinjam dan dana pendidikan. Di samping rukun warga yang berbasis lingkungan, di setiap lingkungan juga dibentuk kelompok kegiatan bapak-bapak, Ibu-ibu dan remaja. Keanggotaan rukun lingkungan ini bersifat terbuka. Artinya, semua warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu, berhak menjadi anggota ataupun pengurus Rukun Lingkungan tersebut, tanpa melihat agama, asal daerah maupun etnis tertentu.

- Kelompok yang dibentuk oleh Gereja. Untuk kasus Desa Wewelan dibentuk oleh Gereja Masehi Injil Minahasa (GMIM) yang kemudian dikenal GMIM Kolom. Setiap kolom beranggotakan sekitar 30 anggota, dan akan dimekarkan bilamana kelompok tersebut terlalu besar. Di Desa Wewelan terdapat 28 GMIM Kolom, yang melaksanakan kegiatan memberi bantuan ke-dukaan. Sebagian GMIM Kolom juga mengelola arisan, selain kebaktian kelompok. Selain GMIM Kolom terdapat juga satu kelompok besar yang bernama GMIM Matuari. Kolom besar ini merupakan modifikasi dari GMIM Kolom tiga, dimana pada saat sebagian besar Kolom tidak aktif pada awal tahun 1980-an, maka banyak jama'ah GMIM dari Kolom lain yang bergabung ke dalam GMIM Matuari. Akan tetapi akhir-akhir ini, setelah GMIM Kolom aktif kembali, GMIN Matuari tetap menunjukkan identitasnya sebagai Kolom terbesar dengan anggota lintas Kolom.

Sedangkan untuk kasus Kelurahan Kadoodan, rukun keagamaan dibedakan dengan rukun agama Kristen dan rukun agama Islam. Rukun keagamaan Kristen di Kelurahan Kadoodan ini lebih dikenal luas dengan istilah Kolom. Di Kelurahan Kadoodan terdapat empat Jema'at, yang masing-masing jema'at memiliki 34 Kolom, dan

setiap Kolom memiliki anggota minimal 25 orang. Masing-masing Kolom memiliki struktur organisasi, yaitu ketua Kolom, sekretaris, bendahara dan seksi pengabdian masyarakat. Setiap Kolom memiliki program/ kegiatan, yaitu:

- 1). Santunan bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp. 200.000.
- 2). Kunjungan anggota yang sakit sebesar Rp. 100.000.
- 3). Bantuan anak tidak mampu, terutama bantuan untuk pendidikan.
- 4). Membangun rumah (tahun 2004 sebanyak 1 unit).
- 5). Bingkisan bagi lanjut usia yang dikaitkan dengan perayaan natal (sebanyak 8 orang).

Untuk aktivitas (2) dan (3) sifatnya baru spontanitas anggota Kolom belum menjadi program permanen. Pada umumnya setiap Kolom memiliki asset berupa kursi dan pengeras suara. Sedangkan sumber dana Kolom diperoleh dari anggota Kolom yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, minimal Rp. 1.000 per minggu. Selain berasal dari iuran anggota, dana diperoleh dari pribadi-pribadi anggota yang mampu. Kemudian masing-masing Kolom setiap bulan wajib menyumbang dana ke Jema'at untuk mendukung program pada tingkat Jema'at yang setiap tahunnya memerlukan dana sebesar Rp. 5 juta.

Rukun keagamaan kedua adalah rukun keagamaan Islam atau Ta'lîm. Ta'lîm ini bersifat terbuka terhadap etnis manapun untuk menjadi anggotanya. Ta'lîm memiliki kepengurusan dan program kerja, yang sifatnya keagamaan maupun sosial. Kegiatan keagamaan seperti pengajian atau yasinan yang dilaksanakan setiap minggu sore, bertempat di rumah-rumah anggota secara bergiliran. Aktivitas keagamaan lainnya, yaitu melak-

sanakan peringatan hari-hari besar Islam. Kemudian aktivitas sosial, berupa santunan bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp. 200.000, yang diambilkan dari kas dari ditambah masing-masing anggota sebesar Rp. 5.000.

- c. Kelompok independen, baik yang memiliki akses ke warga secara lokal, maupun yang memiliki akses ke berbagai sumber vertikal.

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok independen ini, yaitu :

- 1). Rukun Sosial Tumotto di Desa Wewelan. Rukun ini beranggotakan kaum ibu sebanyak 95 orang yang menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti: arisan, simpan pinjam dan dana duka. Keanggotaan Rukun Sosial Tumotto ini bersifat lintas lingkungan, dan lintas GMIM Kolom.
- 2). Badan Musyawarah Masyarakat (BKM) Wangun Wanua, yang dapat diterjemahkan "Membangun Kampung Menjadi Baik". Kelompok ini sudah berbentuk LSM, namun wilayah kerjanya terbatas pada tingkat desa. Kelompok ini bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yang memiliki akses horizontal maupun vertikal, sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke tingkat propinsi. Sasarannya adalah seluruh warga masyarakat Desa Wewelan tanpa membedakan agama maupun etnis. Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pelatihan kerajinan (home industry) kripik pisang dan kacang telor bagi lanjut usia. Kemudian memberikan pelatihan pertukangan, lantainisasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu membentuk KSM yang anggotanya tukang ojek motor dan petani.

3). Kelompok Tani Kawenuan, dengan program penghijauan/pertanian dan Unit Pelaksana Kegiatan Gabungan (UPKG). UPKG adalah organisasi sosial yang pembentukannya diinisiasi oleh dinas pertanian. UPKG melaksanakan kegiatan di bidang pertanian palawija dan perikanan dengan membentuk kelompok-kelompok (ada enam kelompok). Kemudian untuk pembinaan anggota kelompok, UPKG menghadirkan PPL pertanian dan perikanan. Selain itu, untuk pembinaan sosial anggota, dilaksanakan arisan dan menghimpun dana duka bagi anggota yang sakit ataupun yang meninggal dunia.

Pada kasus Kelurahan Kadoodan, terdapat kelompok keagamaan yang dinamakan Persatuan Antar Umat Beragama (PAUB). Kelompok ini merupakan asosiasi atau ollansi dari kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Kelurahan Kadoodan. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan antar umat beragama. Kelompok ini memiliki hubungan vertikal atau akses pada tingkat kabupaten/kota.

- d. Perkumpulan Adat, yaitu keperangkatan pelayanan sosial yang bersifat tradisional, terbesar dan tertua, yang beranggotakan seluruh warga desa/kelurahan. Perkumpulan yang terbentuknya dilandasi oleh adat ini disebut dengan Serikat Umum. Kelompok ini melaksanakan kegiatan yang relatif sama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rukun Lingkungan dan GMIM Kolom, terutama di bidang dana kedukaan. Pada saat ada peristiwa duka, Serikat Umum, GMIM Kolom maupun Rukun Lingkungan bersama-sama mengusahakan bantuan keuangan untuk membantu keluarga yang mengalami kedukaan. Karena itu, bagi keluarga yang mengalami

kedukaan, mereka tidak hanya menerima bantuan keuangan dari satu sumber saja, akan tetapi mendapatkan bantuan pula dari sumber lain sekurang-kurangnya ada tiga sumber bantuan keuangan, yaitu dari Serikat Umum, GMIM Kolom dan Rukun Lingkungan. Bantuan ini akan bertambah lagi, apabila keluarga yang mengalami kedukaan tersebut juga menjadi anggota Rukun Sosial Tumotto yang akan menerima uang duka sebesar Rp. 285.000.

2. Dimensi Sistem Nilai

Di setiap Desa dan Kelurahan di Propinsi Sulawesi Utara, tumbuh dan berkembang nilai sosial budaya yang dikenal dengan Mapalus. Mapalus ini mendasari tumbuhnya berbagai kelompok atau rukun, baik rukun yang berbasis lingkungan (Rukun Lingkungan), keagamaan (GMIM Kolom dan Ta'lim) dan kelompok independen (BKM, Rukun Sosial Tumotto, Kelompok Tani Kawenuan). Semangat Mapalus ini telah terlembaga secara luas di semua aspek kehidupan warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang pertanian, duka-cita, suka-cita, pembuatan rumah, penghijauan, kebersihan lingkungan, perbaikan jalan dan lain sebagainya.

Kemudian terdapat nilai-nilai lokal yang terlembaga dengan baik, seperti menghargai perbedaan perkawinan campuran antar etnis, anti kekerasan, toleransi, peduli terhadap nasib orang lain, meskipun mereka beda agama maupun etnis, memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan meskipun berasal dari etnis lain; dan tidak mudah terprovokasi.

Sebagai contoh kasus :

- a. Walaupun Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Amboin) dan Maluku Utara (Ternate) terjadi konflik sosial dengan kekerasan, warga masyarakat Sulawesi Utara tetap tenang, dan bahkan secara suka rela menampung puluhan ribu pengungsi dari daerah

yang mengalami konflik. Masyarakat memberi bantuan dalam bentuk tempat tinggal, obat-obatan, makanan dan pakaian. Sebagai bukti cinta perdamaian, masyarakat senantiasa waspada terhadap orang yang bermaksud menghasut warga masyarakat.

- b. Pada setiap peringatan hari besar agama, para remajanya saling bantu. Apabila umat Kristen yang merayakan hari besar agamanya dan Natal, maka yang menjaga keamanan, lalu lintas dan parkir adalah remaja dari umat Islam. Begitu sebaliknya, apabila umat Islam merayakan hari besar agama dan Idul Fitri, maka yang menjaga keamanan, lalu lintas dan parkir adalah remaja dari umat Kristen. Kenyataan ini merupakan kondisi kehidupan antar umat beragama yang penuh toleransi dan kedamaian.

3. Dimensi Jaringan Sosial

Jaringan sosial dapat dipahami sebagai tata hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar KPS, ataupun antar KPS dengan WKSBM sebagai sebuah institusi. Jaringan sosial ini terbangun dalam rangka mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya KPS maupun WKSBM, untuk selanjutnya dimobilisasi untuk pembangunan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa di Desa Wewelan dan Kelurahan Kadoodan telah tumbuh KPS yang telah melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti keagamaan, pertanian, kedukaan, pendayagunaan lingkungan alam dan sekitar kerumah tanggaan. KPS tersebut telah melaksanakan berbagai kegiatan, dan secara organisasional sudah mengembangkan interaksi antara KPS tersebut. Selain masing-masing KPS menjalankan kegiatannya sendiri-sendiri, untuk kepentingan anggotanya, mereka juga melaksanakan kegiatan secara terpadu

dengan KPS yang lain. Selain secara kelembagaan, secara individual atau orang per orang, juga terjadi interaksi sosial antara anggota KPS yang satu dengan anggota KPS lain. Karena itu, hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap keperangkatan pelayanan sosial sudah menunjukkan hasil yang dapat dinikmati oleh warga masyarakat secara luas.

C. PERANAN WKSBM DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

WKSBM sebagaimana konsep yang dikembangkan Departemen Sosial di lapangan ditemukan WKSBM dalam kategori tumbuh, dimana unsur WKSBM yang ada berupa KPS-KPS, ditambah dengan kearifan lokal dan sistem nilai sosial yang ada di Kelurahan Kadoodan (tipe kelurahan homogen) maupun di Desa Wewelan (tipe kelurahan heterogen), dirasakan oleh anggota dan warga masyarakat telah memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh KPS-KPS, seperti : pengajian, kebaktian, arisan, simpan pinjam, kerajinan, pertanian palawija, gotong royong dan tolong menolong antar warga masyarakat, santunan kepada anak yatim dan lanjut usia/jompo, telah nyata manfaatnya.

KPS telah memberikan kemudahan bagi setiap anggota memperoleh pelayanan sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi rumah tangga (kebutuhan pokok) dan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dengan demikian KPS di Kelurahan Kadoodan maupun di Desa Wewelan telah berperan nyata dalam membantu masyarakat. KPS tersebut menge-depankan kedamaian sosial dalam kehidupan masyarakatnya, ditandai dengan saling percaya. Prinsip saling percaya dan kebersamaan inilah yang merupakan dasar pengelolaan KPS tersebut.

KPS memberikan kemudahan bagi anggota untuk mengakses pelayanan sosial. Bagi warga masyarakat yang menghadapi musibah, sakit maupun kematian, melalui KPS dibantu untuk mengurangi beban keluarga. Kepada warga yang sakit diberikan dana sehat untuk pengobatan, kepada warga yang anggota keluarganya meninggal diberikan dana pengurusan jenazah, warga yang mengadakan acara suka cita dibantu dalam

penyiapan sarana prasarana yang diperlukan. Oleh karena itu, KPS yang ada di Kelurahan Kadoodan (tipe desa perkotaan) maupun di Desa Wewelan (tipe desa perdesaan), benar-benar memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat lokal. Beberapa manfaat sosial yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kerukunan, gotong royong dan tolong menolong, baik antar anggota keperangkatan pelayanan sosial maupun pada masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang diwarnai tolong menolong dan gotong royong ini tidak terbatas di dalam kelompok sendiri, tetapi meluas dengan anggota di luar kelompoknya. Dalam tolong menolong ini tidak membedakan agama, etnis maupun suku. Sebagai contoh kehidupan yang penuh toleransi ini terjadi antara Remaja Masjid dengan Remaja Gereja, yang saling membantu dan mendukung kegiatan antar mereka.
2. Terpeliharanya nilai, adat istiadat dan kearifan lokal yang sarat dengan pesan-pesan moral yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku warga masyarakat pada umumnya. Meskipun banyak perbedaan pada masyarakat, baik dari segi agama, etnis, suku, dan sosial-ekonomi; masyarakat hidup secara damai. Tidak pernah terjadi konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama, etnis maupun kesukuan. Sebagai contoh kehidupan yang penuh damai ini ketika pengungsi dari Ambon masuk ke Sulawesi Utara. Meskipun ada perbedaan agama, etnis dan suku antara mereka, para pengungsi tersebut diterima dengan terbuka selayaknya menerima kedatangan saudara sendiri yang datang dari jauh. Para pengungsi yang luka diberikan pertolongan pengobatan, diberi makanan, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya, tanpa ada perhitungan ekonomi. Apa yang dilakukan terhadap para pengungsi benar-benar tindakan yang tulus tanpa pamrih.

Bentuk-bentuk kegiatan dan kemanfaatan dari kegiatan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, menunjukkan betapa besarnya peranan WKSMB dalam pembangunan masyarakat lokal. WKSMB sudah mampu menjadi media pembelajaran dan media aksi sosial bersama bagi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

IV. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

KPS yang tumbuh dan berkembang di masyarakat akar rumput merupakan fenomena sosial yang dapat dipahami dalam konsep kapital sosial, yang dewasa ini berkembang dalam diskusi dan studi pembangunan. Konsep kapital sosial ini dipopulerkan oleh Puttman dan Fukyama yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan masyarakat. Di Indonesia konsep yang aslinya "social capital" diterjemahkan oleh sebagian menjadi "modal sosial", dan sebagian yang lain menterjemahkan menjadi "kapital sosial". Meskipun ada perbedaan dalam penerjemahannya, namun ada pemahaman yang sama, bahwa capital social merupakan institusi, nilai dan jaringan-jaringan yang menjadi sumber bagi masyarakat lokal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pelajaran yang dapat dipetik (*lesson learn*) dari hasil penelitian mengenai peranan WKSMB dalam pembangunan masyarakat, bahwa :

1. Pada tingkat masyarakat akar rumput (*grassroots level*) terdapat kapital sosial yang berbentuk KPS, baik yang berbasis keagamaan, jenis pekerjaan maupun lingkungan dan adat. Keperangkatan pelayanan sosial ini menyebar pada semua komunitas, baik yang hidup secara tradisional (perdesaan) maupun yang sudah maju (perkotaan) sebagaimana ditemukan di Kelurahan Kadoodan Kabupaten Bitung dan Desa Wewelan Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara.

Dalam kehidupan sehari-hari, KPS tersebut telah berperan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemecahan masalah sosial dan memperkuat aktivitas

V. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan beberapa saran kepada instansi sosial provinsi Sulawesi Utara, instansi sosial Minahasa dan Bitung yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan peranan WKSMB dalam pembangunan masyarakat, yaitu :

1. Sosialisasi Konsep WKSMB

Sebaik apapun konsep WKSMB yang disiapkan oleh pusat, tidak akan sesuai ketika diimplementasikan apabila para pelaksana kegiatan di daerah tidak memahami dengan baik konsep WKSMB tersebut. Sehubungan dengan itu, sosialisasi dan bimbingan teknis perlu dilakukan secara terus menerus, terutama diperuntukkan bagi para fasilitator di instansi sosial provinsi maupun kabupaten/kota.

Tujuan yang akan dicapai dari sosialisasi dan bimbingan teknis ini agar para pelaksana kegiatan di instansi sosial provinsi maupun kabupaten/kota benar-benar memahami konsep, terminologi dan aspek-aspek yang berkenaan dengan WKSMB. Apabila telah terjadi kesamaan pemahaman, maka kegiatan selanjutnya akan mudah dilaksanakan, dan tujuan akan dapat tercapai secara optimal.

Sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara berjenjang. Tim Pusat dari Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat melakukan sosialisasi kepada para pelaksana kegiatan di instansi sosial provinsi. Kemudian Tim Provinsi dari Sub Dit terkait melakukan sosialisasi kepada para pelaksana kegiatan di instansi sosial kabupaten/kota.

2. Penumbuhan dan Pemberdayaan WKSMB.

WKSMB yang sudah terbentuk atau tumbuh, perlu ada penguatan-penguatan melalui kegiatan pemberdayaan, baik menyangkut aspek kelembagaan, program dan hasil. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah semakin kuatnya kelembagaan dan program-program WKSMB, sehingga mampu memperluas jangkaun pelayanannya dan meningkatkan kemanfaatannya bagi anggota masyarakat atau pemerlu pelayanan sosial. Pemberdayaan dilaksanakan oleh Tim Pusat yang bekerjasama dengan instansi sosial provinsi maupun kabupaten/kota serta bermitra kerja dengan organisasi sosial atau LSM setempat.

3. Pengendalian

Dalam rangka pembangunan masyarakat berbasis kapital sosial, Departemen Sosial bersama-sama dengan dinas sosial propinsi Sulawesi Utara perlu dibuat profil WKSMB. Tujuan menghimpun profil WKSMB ini dalam rangka mengetahui klasifikasi WKSMB, apakah WKSMB yang telah ditumbuhkan sejak tahun 2004 itu berada pada klasifikasi tumbuh, berkembang atau mandiri. Tersedianya informasi ini akan menjadi umpan balik bagi penanggung jawab program, baik di pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota guna penyempurnaan maupun pengembangan program lebih lanjut. Berdasarkan informasi itu pula dapat diketahui kesesuaian konsep WKSMB dengan kenyataan ketika konsep tersebut diimplementasikan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqagrie, Syarif Ibrahim, 1999, "Konflik Etnis di Ambon dan Sambas : Suatu Tinjauan Sosiologis". *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Jakarta : Fakultas Antropologi Universitas Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, 2005, "Pedoman Pemberdayaan WKSMB", Jakarta : Departemen Sosial

- Fukuyama, Francis, 1999. *Sosial Capital and Civil Society*, Georgia : The Institute of Public Policy, George Mason University.
- Goler, Nicole van Rasvensburg. 2001, "Meningkatkan Kondisi Kerangka Penghapusan Kemiskinan, Peran Apakah yang Dapat Dilakukan oleh Organisasi Lokal?", dalam Izzeddin Bakhit (et.all), *Attacking the Roots of Poverty (Menggempur Akar-Akar Kemiskinan)*/ Freederik Ruma : penterjemah), Jakarta : YAKOMA – PGI.
- Hadiz, Vedi R. 1999. *Organisasi Kapital Masyarakat Madani dan Pembangunan di Asia Tenggara : Kasus Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hasbullah, Jousairi, 2006, *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, Jakarta : MR-United Press.
- Korten, David C. 1989, *Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Lawang, MZ Robert. 2005. *Kapital Sosial : Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*, Jakarta : UI-Press.
- Markus, Sudibyo, "Infrastruktur Sosial Masyarakat Tingkat Lokal sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Program WKSBN, 25-27 September 2002", di Cipayung – Bogor.
- Nuryana, Mu'man, "Peran Lembaga Sosial Komunitas dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Program WKSBN, 25-27 September 2002", di Cipayung – Bogor.
- Potensi Desa Wewelan, 2005.
- Potensi Kelurahan Kadoodan, 2005.
- Soetarso. 1991. *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat*, Bandung : KOPMA STKS.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

BIODATA PENULIS :

Suradi, adalah peneliti madya bidang Kebijakan Sosial pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.